



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN NGADA TERHADAP
NOTA KEUANGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang terhormat,

Bapak Bupati Ngada,

Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada;

Sekretaris Daerah Ngada;

Bapak Ibu Asisten pada Setda Kabupaten Ngada;

Bapak Ibu Staf Ahli Bupati Ngada;

Pimpinan SKPD lingkup Setda Kabupaten Ngada;

Rekan –rekan Wartawan, singkatnya hadirin dan Undangan yang kami hormati.

MERDEKA !!!

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat perlindungan-NYA, sehingga kita semua diberikan kesehatan badan dan jiwa, untuk dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ngada pada hari ini.

Pada kesempatan yang berahmat ini, Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan Pandangan Umum yang berisi catatan kajian kritis serta masukan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun 2024.

Penyampaian Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada tahun anggaran 2024, merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengolahan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dan berhasil guna.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Keterlibatan DPRD kabupaten dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu implementasi dari fungsi Pengawasan maupun buggeting.

Nota Keuangan yang disampaikan oleh Bupati Ngada merupakan dasar bagi Fraksi dalam mencermati beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian kita bersama.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah dalam pencapaian indikator mikro disetiap urusan Pemerintahan Daerah, dimana realisasi mencapai 80an % dari seluruh data yang sudah terupdate. Namun demikian capaian indikator mikro belum mampu memberi dampak pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan ekonomi secara signifikan.

Sidang Dewan Yang Kami Muliakan,

Mencermati Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024 , Fraksi melihat ada beberapa hal yang menjadi titik fokus didalam LHP BPK yakni berkaitan dengan **Kinerja Pendapatan Daerah, Kinerja Belanja Pemerintahan Daerah dan Silpa.**

I. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah ditetapkan pada tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.1.068.374.876.962,00- Realisasi sebesar Rp.1.061.046.737588.51,yang artinya kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.328.139.403,49,-penurunan pendapatan tersebut dapat diartikan oleh Fraksi PDI Perjuangan sebagai tidak maksimalnya Pemerintah dalam sistem pengelolaan Pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada demi peningkatan Pendapatan Daerah. Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,masih menjadi catatan untuk dapat mencapai target.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah masih bertumpuk pada pajak daerah. Rendahnya kontribusi retribusi dari pemanfaatan aset daerah, menunjukan pengelolaan aset belum berjalan optimal.

Peningkatan Pendapatan daerah masih gagal maka akan berdampak semakin sulitnya perekonomian masyarakat. Terhadap penggunaan anggaran sebagai dampak pertumbuhan ekonomi global. Fraksi meminta penjelasan pemerintah perincian penggunaan anggaran tersebut.

II. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah 2024 sebesar Rp.1.015.499.256.724,20 dari Anggaran sebesar Rp.1.102.334.439.498,00 disebabkan antara lain ;

- a. Realisasi bagi hasil pajak kepada kabupaten lebih rendah dibanding anggaran, sebagai akibat tidak tercapainya pendapatan.
- b. Pengendalian belanja dalam rangka mengimbangi ketidak tercapainya pendapatan.
- c. Realisasi bantuan keuangan pada kabupaten mengalami keterlambatan.
- d. Adanya sisa tender yang tidak dilaksanakan / gagal lelang.

Beberapa point yang menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan menyarankan

1. Mencermati **Belanja Tidak Langsung** maupun dari **Belanja Langsung** terdapat beberapa catatan yang disampaikan yakni setiap belanja harus dirincikan penggunaannya sehingga dari presentase kita dapat melihat grafik capaian, serta pada pos belanja bantuan sosial, Fraksi pertanyakan bentuk bantuan apa saja dan kenapa realisasinya baru mencapai 87,44 % serta belanja tak terduga yang pencapaiannya 53.02 %.
2. Fraksi juga meminta penjelasan Pemerintah terhadap pos Belanja Bagi Hasil yang pencapaiannya hanya 59.22% .

III. SILPA

Silpa tahun anggaran 2024 sebesar Rp.79.746.727.490,46, Nilai Silpa sedemikian besarnya menunjukkan kurangnya komitmen Eksekutif untuk memaksimalkan sumber daya berupa dana pembangunan daerah. Artinya Pemerintah belum maksimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

IV. REKOMENDASI

Walaupun hasil pemeriksaan BPK memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal tersebut tidak menjamin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan :

1. Mencantumkan dan menjabarkan setiap capaian dinas dari target indikator kinerja sesuai dengan Perpu sistem akuntabilitas untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Meningkatkan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang mampu menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.
3. Melakukan evaluasi terhadap besarnya jumlah belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Ngada tahun 2024. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan seluruh proses diskusi dan perbincangan Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dalam masa sidang ini sesuai dengan mekanisme kedewanan.

Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat ungkapan yang salah dan tidak menyenangkan, Semoga TUHAN memberkati.

Bajawa, 11 juli 2025.

FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN NGADA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siprianus Ndiwal,ST	Ketua	
2.	Leonardus Talo	Wakil Ketua	
3.	Wilfridus Muga,M.pd	Sekretaris	

